



Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dengan Rasio Share dan Growth

Zubaidah Rahman

Universitas Gorontalo/Jl. A. A Wahab, Kec. Limboto Kab. Gorontalo, Gorontalo/Indonesia

Email: zubaidahrahman78@gmail.com

Citation: Rahman, Z. (2022). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dengan Rasio Share dan Growth. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(2), 233–242. DOI: [10.32662/gaj.v5i2.2472](https://doi.org/10.32662/gaj.v5i2.2472)

Artikel info

Artikel history:

Received: 04-10-2022

Revised: 18-10-2022

Accepted: 24-10-2022

Abstract. *This study aims to measure the regional financial capacity. The data was used in the form of Financial Statements obtained from the Finance Agency of North Gorontalo Regency. The analytical method used is using share and growth analysis tools. The results of the research with share analysis show that North Gorontalo Regency during the five years, 2016-2020, has a meager criterion value, meaning that North Gorontalo Regency does not yet have the financial capacity to finance all of its total expenditures and is still dependent on the Central Government. Furthermore, the study's results as measured by growth analysis showed that North Gorontalo Regency during the 2016-2020 period had a low criterion value. This means that North Gorontalo Regency has poor growth in Regional Original Income (PAD) so North Gorontalo Regency does not yet have optimal prospects for future economic growth.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah. Data yang digunakan berupa Laporan Keuangan yang diperoleh dari Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Metode analisis yang digunakan yakni menggunakan alat analisis *share* dan *growth*. Hasil penelitian dengan analisis *share* menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo Utara selama periode lima tahun yaitu 2016-2020 memiliki nilai kriteria sangat rendah, artinya Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai seluruh total Belanjanya dan masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Selanjutnya, hasil penelitian yang diukur dengan analisis *growth* menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2016-2020 memiliki nilai kriteria rendah. artinya bahwa Kabupaten Gorontalo Utara memiliki pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang baik sehingga Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki prospek pertumbuhan ekonomi ke depan yang optimal.

Keywords:

*Kemampuan
Keuangan; Share;
Growth*

Corresponden author:

Email: zubaidahrahman78@gmail.com

Pendahuluan

Masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari pemerintah Daerah yang perlu diperhatikan secara baik-baik. Dalam menilai akuntabilitas suatu organisasi, maka sangat perlu untuk menggunakan pengukuran terhadap suatu kinerja, hal ini lebih penting dilakukan daripada hanya sekedar menyampaikan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. Hadirnya standar akuntansi pemerintah (SAP) menegaskan kembali bahwa kewajiban kepala daerah untuk menyusun laporan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah maka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkan analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan juga digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan (Salviyani, 2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah untuk Kabupaten Langkat belum mandiri dalam membiayai kegiatan Pemerintahannya disebabkan karena pemerintah daerah masih tergantung pada bantuan dana eksternal (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Dalam hasil perhitungan *Share* dan *Growth* terhadap ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015, maka diperoleh data *Share* (rendah) dan *Growth* (Tinggi) kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran, posisi Kabupaten Langkat pada kuadran II, yaitu kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensial lokal, sehingga pendapatan asli daerah berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.

Sementara penelitian yang dilakukan (Suryani, 2020), bertujuan untuk mengukur dan menganalisis tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Ajatappareng tahun 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis rasio Share sebesar 8,07 % dan hasil analisis rasio pertumbuhan *growth* sebesar 29,68 % menunjukkan bahwa nilai *share* tergolong rendah sedangkan nilai *growth* tergolong tinggi. Sedangkan dengan menggunakan peta analisis kemampuan keuangan daerah menggunakan metode kuadran, menunjukkan bahwa masing-masing daerah tersebut berada pada posisi kuadran II yang menunjukkan sumbangan (*share*) pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) pendapatan asli daerah (PAD) tinggi.

Sedangkan (Hasan & Jumiyanti, 2021), melakukan penelitian dengan judul peta kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk setiap daerah di Provinsi Gorontalo dengan metode kuadran secara umum masih pada porsi relatif merata. Kuadran I dengan kondisi daerah ideal yang artinya daerah ini dikategorikan daerah mandiri dan berpotensi yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya terdapat dua daerah yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara masuk zona kuadran II yang artinya merupakan kondisi daerah belum ideal.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Wilayah Gorontalo Utara

| Tahun | Pendapatan | Belanja |
|--------------|-------------------|-----------------|
| 2016 | 682.605.027.140 | 558.403.678.493 |
| 2017 | 727.347.077.444 | 573.620.111.057 |
| 2018 | 705.863.539.619 | 579.843.643.558 |
| 2019 | 774.574.586.784 | 617.307.352.631 |
| 2020 | 778.141.313.339 | 618.736.615.809 |

Sumber : Pemda Kab. Gorontalo Utara, 2022

Jika dilihat dari tabel 1, daerah Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan peningkatan anggaran pendapatan selama 5 tahun terakhir. Walaupun sempat terjadi penurunan pendapatan di tahun 2018 serta belanja yang terus meningkat. Namun data tersebut belum bisa memastikan apakah dengan peningkatan tersebut daerah Gorontalo Utara sudah tergolong memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai belanja daerahnya dan apakah sudah memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang baik atau sebaliknya yang artinya belum mampu membiayai sendiri seluruh kebutuhan belanja daerahnya, yang mana Pendapatan Asli Daerahnya hanya mampu membiayai kegiatan belanja rutin dan belanja pembangunan dari sumber-sumber pendapatan daerahnya dan sisanya lebih banyak dari subsidi pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus atau Dana Bagi Hasil). Secara teori menurut Bappenas (2003), bahwa suatu daerah dikatakan ideal apabila sumbangan PAD terhadap total belanja daerah memiliki nilai yang tinggi serta pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Maka Analisis *Share* dan *Growth* diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai apakah daerah Kabupaten Gorontalo Utara sudah memiliki kemampuan keuangan serta pertumbuhan ekonomi yang baik atau mampu membiayai sendiri daerahnya tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, data ini berupa angka-angka yang di ambil dari laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. sumber data dalam penelitian ini Adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara selama lima tahun terakhir yakni laporan keuangan dari tahun 2016-2020. dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada pada Kabupaten Gorontalo Utara.

Analisis Share

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu perhitungan analisis *share*. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai seluruh total belanja pada tahun 2016-2020. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Share} = \frac{(\text{PAD} + \text{DBH})}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Bappenas, (2003) dalam (Haryanto, 2017)

Keterangan :

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| <i>Share</i> | : Peranan |
| PAD | : Pendapatan Asli Daerah |
| DBH | : Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam) |
| Total Belanja | : Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |

Berdasarkan Tim Litbang Depdagri (1991) dalam Arnaldi (2019) standar rasio *share* untuk mengetahui kemampuan keuangan dalam membiayai belanja daerah yaitu :

| | |
|---------------|-------------------|
| Sangat rendah | : 0,00% - 10,00% |
| Rendah | : 10,01% - 20,00% |
| Sedang | : 20,01% - 30,00% |
| Cukup | : 30,00% - 40,00% |
| Tinggi | : 40,00% - 50,00% |
| Sangat tinggi | : >50,00% |

Analisis Growth

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu perhitungan analisis *growth*. analisis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah namun lebih menengkan pada pertumbuhan pendapatan asli daerah serta melihat bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi kedepan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Growth} = \frac{(\text{PAD} + \text{DBH})_t + (\text{PAD} + \text{DBH})_{t-1}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Bappenas, (2003) dalam (Haryanto, 2017)

Keterangan :

- Growth* : Pertumbuhan
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 DBH : Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam)
 t : Periode Saat Ini
 t-1 : Periode Sebelumnya

Berdasarkan Tim Litbang Depdagri (1991) dalam Arnaldi (2019) standar rasio *growth* untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah namun lebih menengkan pada pertumbuhan pendapatan asli daerah serta melihat bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi kedepan yaitu :

- Sangat rendah : 0,00% - 10,00%
 Rendah : 10,01% - 20,00%
 Sedang : 20,01% - 30,00%
 Cukup : 30,00% - 40,00%
 Tinggi : 40,00% - 50,00%
 Sangat tinggi : >50,00%

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2016-2020.

Analisis Share

Berdasarkan data tahun 2016-2020 maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Perhitungan *Share* 2016-2020

| Tahun | Realisasi Penerimaan PAD | Jumlah DBH | Total Belanja Daerah | Share |
|-------|--------------------------|----------------|----------------------|-------|
| 2016 | 24.586.696.146 | 14.084.121.856 | 558.403.678.493 | 6,93% |
| 2017 | 44.817.338.961 | 11.277.346.346 | 573.620.111.057 | 9,78% |
| 2018 | 27.302.685.285 | 9.456.217.835 | 579.843.643.558 | 6,34% |
| 2019 | 32.056.965.027 | 6.832.948.800 | 617.307.352.631 | 6,30% |
| 2020 | 27.340.589.523 | 7.624.184.045 | 618.736.615.809 | 5,65% |

Sumber : Data diolah 2022

Dari hasil tabel 2 pada tahun tahun anggaran 2016 sebesar 6,93 % merupakan hasil total realisasi Pendapatan Asli Daerah yang terdaftar sebesar Rp.24.586.696.146,18 ditambah dana bagi hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sebesar Rp.14.084.121.856,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.558.403.678.493,00.

Berdasarkan perhitungan, nilai *share* untuk tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebesar 9,78% merupakan hasil total realisasi pendapatan asli daerah yang terdaftar sebesar Rp.44.817.338.961,34 ditambah dana bagi hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sebesar Rp.11.277.346.346,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.573.620.111.057,00.

Berdasarkan perhitungan Rasio *share* untuk tahun 2018 sebesar 6,33%

merupakan hasil total realisasi pendapatan asli daerah yang terdaftar sebesar Rp.27.302.685.285,80 ditambah dana bagi hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sebesar Rp.9.456.217.835,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.579.843.643.558,00.

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka nilai *share* untuk tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 6,29% merupakan hasil total realisasi pendapatan asli daerah yang terdaftar sebesar Rp.32.056.965.027,54 ditambah dana bagi hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sebesar Rp.6.832.948.800,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.617.307.352.631,53.

Nilai *share* untuk tahun 2020 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 5,65% merupakan hasil total realisasi pendapatan asli daerah yang terdaftar sebesar Rp.27.340.589.523,42 ditambah dana bagi hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sebesar Rp.7.624.184.045,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.618.736.615.809,00.

Analisis Growth

Dari hasil analisis terhadap data tahun 2016-2020 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Perhitungan *Growth* 2016-2020

| Tahun | Realisasi Penerimaan PAD | Jumlah DBH | Total Belanja Daerah | Growth |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 2016 | 24.586.696.146 | 14.084.121.856 | 558.403.678.493 | 13,55% |
| 2017 | 44.817.338.961 | 11.277.346.346 | 573.620.111.057 | 16,52% |
| 2018 | 27.302.685.285 | 9.456.217.835 | 579.843.643.558 | 16,01% |
| 2019 | 32.056.965.027 | 6.832.948.800 | 617.307.352.631 | 12,25% |
| 2020 | 27.340.589.523 | 7.624.184.045 | 618.736.615.809 | 11,94% |

Sumber : Data diolah 2022

Dari hasil tabel 3 nilai *Growth* untuk tahun 2016 sebesar 13,55% merupakan hasil total realisasi pendapatan asli daerah yang ditambah dana bagi hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam periode saat ini sebesar Rp.38.670.818.002,18 ditambah dengan jumlah total realisasi pendapatan asli daerah dengan dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam) periode sebelumnya sebesar Rp.36.971.075.217,82 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.558.403.678.493,00.

Berdasarkan perhitungan, nilai *Growth* untuk tahun 2017 sebesar 16,52% merupakan hasil total realisasi pendapatan asli daerah yang ditambah dana bagi hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam periode saat ini sebesar Rp.56.094.685.307,34 dikurangi dengan jumlah total realisasi pendapatan asli daerah dengan dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam) periode sebelumnya sebesar Rp.38.670.818.002,18 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.573.620.111.057,00.

Berdasarkan perhitungan, nilai *Growth* untuk tahun 2018 sebesar 16,01% merupakan hasil total realisasi pendapatan asli daerah yang ditambah dana bagi hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam periode saat ini sebesar Rp.36.758.903.120,80 dikurangi dengan jumlah total realisasi pendapatan asli daerah dengan dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam) periode sebelumnya sebesar Rp.56.094.685.307,34 dibandingkan dengan Total belanja sebesar Rp.579.843.643.558,00.

Berdasarkan perhitungan, nilai *Growth* untuk tahun 2019 sebesar 12,25% merupakan hasil total realisasi pendapatan asli daerah yang ditambah dana bagi

hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam periode saat ini sebesar Rp.38.889.913.827,54 dikurangi dengan jumlah total realisasi pendapatan asli daerah dengan dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam) periode sebelumnya sebesar Rp.36.758.903.120,80 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.617.307.352.631,53.

Berdasarkan perhitungan, nilai *Growth* untuk tahun 2020 sebesar -11,94% merupakan hasil total realisasi pendapatan asli daerah yang ditambah dana bagi hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam periode saat ini sebesar Rp.34.964.773.568,42 dikurangi dengan jumlah total realisasi pendapatan asli daerah dengan dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam) periode sebelumnya sebesar Rp.38.889.913.827,54 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.618.736.615.809,00.

Pembahasan

Analisis Share

Tabel 4. Hasil Perhitungan *Share* 2016-2020

| Tahun | Realisasi Penerimaan PAD | Jumlah DBH | Total Belanja Daerah | Share | Kriteria |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 2016 | 24.586.696.146 | 14.084.121.856 | 558.403.678.493 | 6,93% | Sangat rendah |
| 2017 | 44.817.338.961 | 11.277.346.346 | 573.620.111.057 | 9,78% | Sangat rendah |
| 2018 | 27.302.685.285 | 9.456.217.835 | 579.843.643.558 | 6,34% | Sangat rendah |
| 2019 | 32.056.965.027 | 6.832.948.800 | 617.307.352.631 | 6,30% | Sangat rendah |
| 2020 | 27.340.589.523 | 7.624.184.045 | 618.736.615.809 | 5,65% | Sangat rendah |

Sumber : Data diolah 2022

Dengan melihat hasil analisis berdasarkan tabel 4 tersebut, maka terlihat bahwa perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total belanja daerah (*share*) tahun 2016 adalah sebesar 6,93% dengan kriteria sangat rendah, angka tersebut menjelaskan bahwa di tahun 2016 Kemampuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara dalam membiayai seluruh total belanjanya hanya sebesar 6,93% sementara ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema transfer ke daerah khususnya komponen dana perimbangan mencapai 94%. Kemudian di tahun 2017 nilai *share* mengalami kenaikan sebesar 9,78% namun masi termasuk dalam kriteria sangat rendah, artinya di tahun 2017 Kemampuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara dalam membiayai seluruh total belanjanya hanya sebesar 9,78% sementara ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema transfer ke daerah khususnya komponen dana perimbangan mencapai 91%. Selanjutnya pada tahun 2018 nilai *share* kembali mengalami penurunan dengan perolehan angka sebesar 6,34% dengan kriteria sangat rendah, artinya di tahun 2018 Kemampuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara dalam membiayai seluruh total belanjanya hanya sebesar 6,34% sementara ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema transfer ke daerah khususnya komponen dana perimbangan mencapai 94%. Kemudian di tahun 2019 nilai *share* juga mengalami penurunan di angka 6,29% dengan kriteria sangat rendah, artinya di

tahun 2019 Kemampuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara dalam membiayai seluruh total belanjanya hanya sebesar 6,29% sementara ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema transfer ke daerah khususnya komponen dana perimbangan mencapai 94%. Hal ini juga terjadi di tahun 2020 yang mana nilai *share* yang diperoleh lebih rendah dari empat tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 5,65% dengan kriteria sangat rendah, artinya di tahun 2020 Kemampuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara dalam membiayai seluruh total belanjanya hanya sebesar 5,65% sementara ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema transfer ke daerah khususnya komponen dana perimbangan mencapai 95%. Adapun nilai rata-rata *Share* Kabupaten Gorontalo Utara selama kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2016-2020 sebesar 7% dengan kriteria sangat rendah, Angka tersebut menjelaskan bahwa kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara dalam membiayai seluruh total belanjanya hanya sebesar 7% artinya besaran ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat mencapai 93%.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Daerah Gorontalo Utara belum memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai belanja daerahnya. Hal ini disebabkan karena Angka Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sementara angka belanja daerah setiap tahunnya terus meningkat serta angka dana bagi hasil yang masih rendah (DBH). Sehingga angka Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanja, Rendahnya nilai DBH dan Tingginya beban belanja APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ini mengakibatkan nilai *share* cenderung menurun.

Temuan ini sejalan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Haryanto, (2018) menyatakan bahwa hasil analisis *share* dalam laporan keuangan sangat rendah, yang mana bahwasanya daerah yang termasuk kategori sangat rendah ini memang memiliki persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan juga Dana Bagi Hasil (DBH) yang jauh dari harapan.

Haryanto, (2018) juga mengemukakan bahwa tingginya beban belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlalu mengkhawatirkan apabila struktur belanjanya memang dialokasikan untuk belanja bersifat modal serta menimbulkan efek pertumbuhan investasi. yang menjadi permasalahan adalah jika struktur belanja tersebut justru hanya didominasi oleh belanja-belanja aparatur rutin kepegawaian yang tetap memiliki dampak pertumbuhan dari sisi konsumsi, namun tidak berkelanjutan.

Analisis Growth

Tabel 5. Hasil Perhitungan *Growth* 2016-2020

| Tahun | Realisasi Penerimaan PAD | Jumlah DBH | Total Belanja Daerah | Growth | Kriteria |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 2016 | 24.586.696.146 | 14.084.121.856 | 558.403.678.493 | 13,55% | Rendah |
| 2017 | 44.817.338.961 | 11.277.346.346 | 573.620.111.057 | 16,52% | Rendah |
| 2018 | 27.302.685.285 | 9.456.217.835 | 579.843.643.558 | 16,01% | Rendah |
| 2019 | 32.056.965.027 | 6.832.948.800 | 617.307.352.631 | 12,25% | Rendah |
| 2020 | 27.340.589.523 | 7.624.184.045 | 618.736.615.809 | 11,94% | Rendah |

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 5 terlihat perolehan pertumbuhan PAD (*growth*) tahun 2016 adalah sebesar 13,55% dengan kriteria rendah, artinya pertumbuhan PAD

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 13,55% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2017 pertumbuhan PAD mengalami peningkatan dengan perolehan angka yang tinggi yaitu sebesar 16,52% dengan kriteria rendah, artinya pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 16,52% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2018 pertumbuhan PAD kembali mengalami penurunan dengan perolehan nilai sebesar 16,01% dengan kriteria rendah, artinya pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 16,01% dari tahun sebelumnya. dan tahun 2019 pertumbuhan PAD mengalami penurunan sebesar 12,25% dengan kriteria rendah, artinya pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 12,25% dari tahun sebelumnya. Hal ini juga terjadi di tahun 2020 yang juga mengalami penurunan dengan perolehan nilai sebesar 11,94% dengan kriteria rendah, artinya pertumbuhan PAD Gorontalo utara sebesar 11,94%. Adapun nilai rata-rata *growth* Kabupaten Gorontalo Utara selama kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2016-2020 sebesar 14,05% atau dengan kriteria rendah.

Nilai *growth* yang rendah ini menggambarkan bahwa daerah Kabupaten Gorontalo Utara selama periode lima tahun yaitu dari tahun 2016-2020 belum memiliki pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) yang baik, hal ini disebabkan karena menurunnya angka Dana Bagi Hasil (DBH) sementara untuk pos anggaran belanja daerah justru mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 yang mengakibatkan nilai *growth* rendah sehingga Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki prospek pertumbuhan ekonomi ke depan yang optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haryanto, (2018) menyatakan bahwa nilai *growth* untuk beberapa daerah tergolong rendah, yang mana bahwasanya Sebuah daerah dapat memiliki *growth* positif atau negatif tergantung dari kondisi APBD masing-masing, sebuah daerah dengan angka *growth* yang negatif mengandung makna daerah tersebut sudah berada pada periode senja dari sebuah pola pertumbuhan APBD dan wajib untuk sesegera mungkin mengubah pola pembangunan daerahnya menuju arah yang lebih optimal.

Haryanto (2018), juga menyatakan bahwa nilai *growth* rendah menggambarkan adanya permasalahan bersama yang harus diatasi oleh pemerintah daerah. Kondisi ini juga mengindikasikan perlunya koordinasi secara menyeluruh antara masing-masing kabupaten dan kota dengan provinsi dalam mengatasi permasalahan rendahnya pertumbuhan. Melihat karakteristik seluruh kabupaten yang mengisi kategori ini, semakin menguatkan perlunya modernisasi kabupaten dalam mengejar aspek pertumbuhan ekonomi ke depan yang berkelanjutan. Jika tidak maka kabupaten akan selalu melekat dengan stigma tidak mandiri dan tidak memiliki prospek pertumbuhan ekonomi ke depan yang optimal.

Kesimpulan dan Saran

Kabupaten Gorontalo Utara Selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2016-2020 memiliki nilai *share* yang berdasarkan kriteria sangat rendah dan *growth* yang berdasarkan kriteria persentase rendah. Perolehan nilai yang sangat rendah ataupun rendah ini membuktikan bahawa Kemampuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai seluruh total belanjanya, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih tergolong rendah artinya Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki prospek pertumbuhan ekonomi ke depan yang optimal. Hal ini disebabkan karena menurunnya angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sementara untuk pos anggaran belanja daerah justru mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020.

Disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara agar lebih meningkatkan kinerja keuangan dan pemanfaatan PAD agar perlu dimaksimalkan demi menunjang pelaksanaan otonomi daerah, serta dibutuhkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam membangkitkan gairah sektor-sektor pemasukan asli daerah maupun perolehan Dana Bagi Hasil agar kabupaten Gorontalo Utara kedepannya memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang optimal Sehingga daerah tersebut menjadi mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Untuk peneliti selanjutnya perlu menambah alat analisis untuk lebih mengembangkan penelitian ini baik itu penilaian terhadap kemampuan keuangan dalam membiayai belanja daerah ataupun melihat serta meramal bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi daerah kedepannya sebab hasil analisis yang dipakai dalam penelitian ini hanya sebatas menilai *share* dan *growth* dan tidak menutup kemungkinan bila dianalisis menggunakan alat analisis yang berbeda maka hasil analisis pun akan berbeda.

Daftar Pustaka

- Arnaldi, I. Y. (2019). Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Pundi*, 3(1), 83–100. <https://doi.org/10.31575/jp.v4i1.182>
- Haryanto, J. T. (2017). Penghasil Sda Dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal (Comparative Analysis of Regional Financial Mapping from The Producer of Natural Resources and Non-Natural Resources in The Fiscal Decentralization Era). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 103–116.
- Haryanto, J. T. (2018). Kemandirian Daerah dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 312–328. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.88>
- Hasan, W., & Jumiyanti, K. R. (2021). Peta Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 2086–4264.
- Ningtias, Y. D., Nugroho, T. R., & Ainiyah, N. (2016). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016. *Jurnal Akuntansi*, 1–12.
- Rara Mianti, F. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-provinsi Bengkulu sepuluh tahun terakhir*. Universitas Bengkulu.
- Salviyani, A. (2017). *Analisis Rasio Keuangan Menggunakan Perhitungan Share dan Growth Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat*. Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Suryani, B. B. dan S. A. (2020). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Ajatappareng. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2(1), 5–7. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*. Universitas Negeri Semarang.